

## Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Sriharjo Kabupaten Bantul

**Panji Pamungkas, Muhammad Khozin\***

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora, Universitas Aisyiyah  
Yogyakarta, Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No. 63 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. 55292

\*E-mail: [ozin@unisayogya.ac.id](mailto:ozin@unisayogya.ac.id)

---

Article History:

Received : 06/06/2025  
Received in revised form : 11/06/2025  
Accepted : 10/09/2025

---

**Abstract:** Poverty remains the most pressing issue facing Indonesia. Poverty is a complex, multifaceted issue. The Indonesian government has innovated and developed various poverty alleviation programs. However, the problem remains unresolved. This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program in Sriharjo Village. It is hoped that this study will provide policymakers with information on factors influencing the implementation of the Family Hope Program in Sriharjo Village. This study uses a descriptive qualitative approach. The study was conducted in Sriharjo Village, Imogiri Subdistrict, Bantul Regency. Data were collected using observation, interviews, and documentation techniques. Data were analyzed using qualitative data analysis techniques including face compiling, disassembling, reassembling (and arraying), interpreting, and concluding. The results of the study indicate that several factors influencing the implementation of the Family Hope Program in Sriharjo Village include: First, limited understanding of complex language, technical terms, formal communication, and excessively long writing by beneficiaries. Second, resources from the Sriharjo Village government have not been directly involved in the PKH implementation process. Third, a lack of PKH facilitators, resulting in a less than optimal implementation process. Fourth, a lack of commitment from PKH facilitators to implementing the assistance program. Fifth, beneficiaries remain dependent on assistance and are reluctant to leave PKH. This study also found that PKH facilitators have carried out their duties in accordance with applicable SOPs and guidelines.

**Keywords:** Poverty, family welfare, conditional social assistance

**Abstrak:** Masalah kemiskinan masih menjadi masalah paling mendesak yang dihadapi Indonesia. Karena kemiskinan merupakan masalah yang paling rumit dengan banyak aspek. Pemerintah Indonesia telah berinovasi mengembangkan beraneka ragam program untuk pengentasan kemiskinan. Namun masalah kemiskinan masih saja belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program keluarga harapan di Kalurahan Sriharjo. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pengambil kebijakan tentang faktor apa saja yang berpengaruh dalam implementasi program PKH di Kalurahan Sriharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. penelitian dilakukan di wilayah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif yang meliputi *face compiling, disassembling, reassembling (and arraying), interpreting, dan concluding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program keluarga harapan di Kalurahan Sriharjo meliputi, *Pertama,*

Terbatasnya pemahaman penerima manfaat terhadap bahasa yang kompleks, istilah teknis, komunikasi secara formal dan tulisan yang terlalu Panjang. *Kedua*, Sumber daya dari pemerintah Kalurahan Sriharjo yang belum terlibat langsung dalam proses implementasi PKH. *Ketiga*, Kurangnya pendamping PKH, sehingga proses implementasi kurang maksimal. *Keempat*, Komitmen pendamping PKH dalam implementasi program bantuan, dan *Kelima*, Penerima manfaat masih bergantung dengan bantuan dan enggan keluar dari PKH. Penelitian ini juga menemukan bahwa para pendamping PKH sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP serta pedoman yang berlaku.

**Kata kunci:** Kemiskinan, kesejahteraan keluarga, bantuan sosial bersyarat.

## PENDAHULUAN

Permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia adalah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas untuk diselesaikan. Pemerintah Indonesia telah berinovasi mengembangkan beraneka program pengentasan kemiskinan, namun masalah ini belum juga teratasi. Nugroho mengemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu absolut dan relatif pada suatu daerah yang masyarakatnya belum dapat memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari sesuai dengan adat istiadat yang ada (Rini and Sugiharti 2017 ). Kemiskinan absolut diartikan bahwa masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, dan papan) (Sasue and AY Oelin 2023). Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang disebabkan oleh dampak kebijakan yang saat ini belum menjangkau setiap warga negara sehingga menyebabkan kesenjangan sosial (Rahman. 2024). Kemudian kemiskinan relatif adalah jenis kemiskinan di mana pengaruh kebijakan tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat atau daerah, menyebabkan ketimpangan di masyarakat (Nugroho & Dahuri, 2013;Rini and Sugiharti 2017).

Beberapa kebijakan Kementerian Sosial bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara yang terdaftar dalam program perlindungan sosial dilindungi melalui bantuan masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Rumah Sejahtera Terpadu, BPNT/Sembako, dan bantuan sosial tunai lainnya. (Menteri Sosial Republik Indonesia 2023). Program Keluarga Harapan berkonsentrasi dalam menyalurkan bantuan sosial kepada warga negara yang telah memenuhi kriteria serta menuntut untuk merubah perilaku dan pola pikir penerima bantuan

sosial (Suleman and Resnawaty 2017). Program ini bertujuan untuk menyediakan bantuan bersyarat yang tidak hanya memberikan bantuan keuangan tetapi juga mendorong perilaku yang lebih baik dalam hal pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan dasar adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan amanat undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di mana dalam pasal 2 disebutkan bahwa salah satu azas penanganan fakir miskin adalah pemberdayaan (Dehani, Hernawan, dan Purnamasari 2018).

Kapanewon Imogiri merupakan salah satu sasaran dalam implementasi program PKH oleh pemerintah dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 4.307 kepala keluarga dengan rincian jumlah per desa/kelurahan sebagaimana tertulis pada tabel berikut.

**Tabel 1 Jumlah Peserta PKH Menurut Kelurahan di Kecamatan Imogiri, 2023**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>
Selopamioro	1.175
Sriharjo	561
Kebonagung	294
Karangtengah	409
Girirejo	245
Karangtalun	204
Imogiri	230
Wukirsari	1.189
Jumlah	4.307

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2024*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kapanewon Imogiri dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 9.490 keluarga, sebanyak 561 keluarga di Desa Sriharjo masih menerima bantuan PKH. Angka ini merupakan sekitar 5,91 persen dari populasi Desa Sriharjo. Dengan jumlah tersebut, program PKH dapat

menjangkau sebagian kecil penduduk Desa Sriharjo, sehingga program tersebut dapat berfokus pada keluarga yang paling membutuhkan dan memenuhi kriteria kemiskinan. Diharapkan bantuan PKH akan membantu keluarga miskin mengurangi beban finansial, meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan umum Desa Sriharjo.

Menurut George C. Edwards III dalam Agustino (2006) terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Idrus et al. 2023.). Adapun empat indikator tersebut adalah komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur organisasi. Beliau berpendapat bahwa penerapan kebijakan adalah proses yang rumit, yang melibatkan banyak pihak dan institusi pemerintah. Implementasi merupakan hal yang terjadi dalam undang-undang serta memberikan otoritas kepada program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016:134) dalam Al Rosyd dan Anggraini 2023). Implementasi adalah aktivitas, tindakan atau adanya mekanisme sistem. Bukan sekadar aktivitas atau kegiatan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan menurut Usman dalam Miftakhul rasyid 2019 dalam (Rahayu, Anwar, dan Darmi 2023).

Uraian di atas menyebutkan bahwa kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia. Kementerian Sosial membuat suatu program yang di tujukan untuk pemberantasan kemiskinan yang ada di Indonesia, berupa bantuan bersyarat yang di sebut dengan PKH. Program bantuan bersyarat ini bertujuan untuk memberikan akses kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Namun sayangnya program PKH inipun masih banyak mengalami permasalahan dalam implementasinya di lapangan, sehingga perlu dikaji apa saja faktor penyebabnya agar dapat diketahui dan dapat ditangani.

Dari dinamika yang telah dikupas diatas maka penelitian ini merumuskan permasalahan bagaimana implementasi program PKH di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul?. Dengan rumusan masalah tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pengambil kebijakan tentang faktor apa saja yang berpengaruh dalam implementasi program PKH di Kalurahan Sriharjo.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus kepada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti (Cresswell, 2014 dalam Ardiansyah, Risnita, and Jailani 2023). Objek penelitian implementasi kebijakan program keluarga harapan ini berlokasi di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada deskripsi yang menjelaskan secara detail situasi yang sedang berlangsung (Fadli 2021 dalam Zakiyah and Hertati 2024). Penelitian ini berusaha menjelaskan dan memahami suatu fenomena secara naratif, memahami, dan menganalisis secara mendalam fenomena melalui data non-numerik (kata-kata, perilaku, dan dokumen). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono 2005: 83 dalam Nilamsari 2014). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang dikembangkan Soelistyarini melalui lima fase yakni, *compiling* (mengumpulkan data), fase *disassembling* (membongkar data), fase *reassembling* (penyusunan kembali), fase *interpreting* (membuat cerita baru), dan fase *concluding* (membuat kesimpulan). Informan dalam penelitian ini adalah penerima manfaat PKH dan pendamping PKH di Kalurahan Sriharjo. Informan dipilih dengan metode *snowball* dan diseleksi untuk mendapatkan yang lancar berkomunikasi serta benar-benar memahami permasalahan yang terjadi. Data yang diperoleh dari informan kemudian akan dikonfirmasi kepada informan lainnya untuk menguji kebenaran informasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah interaksi antara dua atau lebih orang untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Edward III komunikasi adalah suatu proses penting dan rumit, agar implementasi berjalan efektif, maka harus diterima oleh semua masyarakat dan mengerti dengan jelas mengenai maksud dan tujuan kebijakan (Kusumastuti dan Mustamil Khoiron 2019). Dalam proses implementasi kebijakan program keluarga harapan, pemerintah melalui pendamping PKH mendorong untuk berkoordinasi baik dengan pemerintah kalurahan atau dengan penerima manfaat. Menurut teori implementasi menurut Edward III, komunikasi menjadi aspek penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Tahapan komunikasi

pendamping dalam menyampaikan informasi kepada penerima manfaat dilakukan melalui 3 tahapan yaitu (1) sosialisasi, (2) Proses pendataan, (3) Proses pendampingan. Pada proses sosialisasi, fasilitator berperan sebagai penghubung antara program dan keluarga penerima manfaat (KPM), serta menginformasikan terkait PKH di tingkat kapanewon atau kalurahan. Tahap awal pada tahun 2016 dilakukan oleh masing-masing kepala desa, dan atau fasilitator PKH untuk mendata calon penerima manfaat. Tahap pendataan adalah proses pendataan komponen-komponen yang memenuhi persyaratan penerima manfaat bantuan PKH di Kalurahan Sriharjo meliputi ibu hamil, warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta anak-anak yang masih usia wajib belajar mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pendataan yang akurat dan transparan akan menjadikan fondasi bagi keberhasilan program PKH. Tahap ketiga dalam proses implementasi PKH ialah pendampingan, tahapan ini dirancang untuk memberikan bimbingan, motivasi, dukungan kepada keluarga penerima manfaat agar dapat menjadikan kebermanfaatn bantuan dan dapat mencapai kemandirian. Pendampingan ini bersifat keberlanjutan dan melibatkan interaksi aktif antara fasilitator dan keluarga penerima manfaat di kalurahan Sriharjo.

Proses implementasi sangat tergantung dengan komunikasi untuk tercapainya tujuan pelaksanaan PKH. Proses pendampingan Implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait. Pertemuan rutin yang melibatkan penerima manfaat dan pendamping PKH ini menjadi forum utama untuk menyampaikan informasi terkait jadwal penyaluran bantuan, persyaratan dan mekanisme pencairan dana. Masih ada penerima manfaat yang mengandalkan pertemuan rutin sebagai metode komunikasi. Komponen lansia menjadi salah satu objek yang mengandalkan metode tersebut. Studi di lapangan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 di balai dusun Sompok Kalurahan Sriharjo bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh 82 penerima manfaat, pendamping PKH, serta kepala dusun Sompok Kalurahan Sriharjo. Kejelasan informasi mengenai program keluarga harapan yang diterima oleh penerima manfaat khususnya di Kalurahan Sriharjo cukup jelas. Mulai dari awal sosialisasi, pendataan dan pendampingan penerima manfaat mendapat informasi langsung dari pemerintah pusat melalui undangan yang disalurkan

langsung di kapanewon Imogiri. Salah satu hasil wawancara dengan warga penerima manfaat bantuan PKH berikut menggambarkan pentingnya proses komunikasi :

“Sebelumnya ada pendataan oleh Kapanewon, sebagai penerima diberikan undangan pertama untuk mengikuti sosialisasi dan pendataan ulang oleh pendamping PKH, termasuk mengisi form, kemudian saya mendapat undangan kembali.” (wawancara, 23 April 2025).

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa adanya komunikasi diawali dengan pendataan oleh tihak Kapanewon. Dalam tahapan ini calon penerima manfaat mendapatkan undangan pertama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi serta pendataan ulang yang difasilitasi oleh pendamping PKH. Sosialisasi ini mencakup tujuan program, hak dan kewajiban peserta. Proses ini menggambarkan adanya mekanisme seleksi dan validasi berlapis guna memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran dan berdasarkan data yang valid serta terverifikasi secara langsung oleh pendamping di lapangan.

Keterbatasan sebagian penerima manfaat yang tidak memiliki akses perangkat *smartphone*, dan kelompok sebagian di Kalurahan Sriharjo kebanyakan penerimanya berpendidikan sekolah dasar, sehingga proses komunikasi dirasa kurang efisien. Pendamping PKH diharuskan untuk menjadi translator modul dari kementerian sosial. Sehingga keluarga manfaat tidak memahami benar program keluarga harapan ini. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan pendamping PKH, berikut :

“Tantangan yang dihadapi ialah rata-rata penerimanya ibu-ibu dengan latar belakang berpendidikan SD, beberapa yang tidak dapat memahami istilah asing, sebagai pendamping harus mengkonversi kebahasa sehari-hari.” (wawancara, 14 Mei 2025)

Dari data primer yang didapatkan diketahui bahwa rata-rata penerima manfaat di Kalurahan Sriharjo hanya berpendidikan hingga tingkat sekolah dasar (SD). Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam memahami istilah asing yang sering digunakan dalam sosialisasi. Akibatnya, pendamping memiliki peran strategis tidak hanya fasilitator program, namun sebagai jembatan komunikasi yang harus mampu mengonversi istilah atau konsep ke bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami. Sehingga keberhasilan implementasi PKH dapat tercapai secara lebih efektif dan merata. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratiwi, Kencana, dan Romli 2022, menemukan dalam penyampaian informasi

pendamping PKH harus cukup baik dan jelas, dan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Sebagai tantangan komunikasi tidak cocok menggunakan bahasa formal dengan kompetensi bahasa penerima. Sehingga pendamping PKH harus menyusun mekanisme dengan istilah resmi PKH versi sederhana untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman. Penerima PKH dengan literasi terbatas menjadi hambatan partisipasi kelompok rentan :

Pendamping PKH merupakan ujung tombak yang secara langsung bersinggungan dengan penerima manfaat, memberikan arahan informasi, pendampingan, dan monitoring pelaksanaan program. Menurut Gilbert Ardian Sasue pada penelitiannya mengungkapkan bahwa implementasi program PKH ini rasio jumlah KPM yang banyak dibandingkan dengan pendamping PKH menjadi kendala utama dalam komunikasi. Ketergantungan PKH adalah fenomena yang kompleks serta membutuhkan pendekatan multidimensional. Peran penting dalam jaring pengaman sosial, diperlukan transisi yang jelas menuju kemandirian ekonomi untuk menghadapi efek kemiskinan jangka panjang. Sebagai langkah-langkah penyampaian informasi dan aktivitas program ke penerima manfaat, peningkatan keterlibatan semua pihak termasuk perangkat kalurahan diharapkan dapat mewujudkan komunikasi yang lebih efektif sehingga tujuan PKH bisa tercapai.

## **2.Sumber Daya**

Dukungan sumber daya dalam proses implementasi program keluarga harapan di Kalurahan Sriharjo dapat terwujud dengan ketersediaannya sumber daya yang memadai. Dalam proses implementasi ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu untuk mendukung terselenggaranya implementasi program keluarga harapan di Kalurahan Sriharjo. . Menurut Putri (2024) kemampuan SDM di Sriharjo masih menjadi tantangan, terutama dalam hal kapasitas teknis dan komunikasi pendamping.

Al-Azzeh dan Nuaimi 2015 dalam Hidayat et al. 2024 menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah ide prespektif strategis, dimana tujuannya adalah untuk membuat organisasi *sustainable* dengan memiliki kompetensi yang unggul. Seringkali kegagalan bisa terjadi dalam proses implementasi program salah

satunya disebabkan oleh sumber daya yang tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten. Pada temuan sumber daya manusia yang mengelola PKH ditingkat Kalurahan Sriharjo sangat kurang, dari monitoring untuk pendamping PKH, bahwa dua pendamping memegang rasio 400-549 Keluarga KPM. Pendamping PKH di kalurahan Sriharjo hanya dua orang sedangkan penerimaan program ini berjumlah 549 yang tersebar di 12 padukuhan. Padukuhan dengan jumlah paling banyak penerima bantuan ini berada di dusun Sompok dengan jumlah 82 keluarga penerima manfaat. Pentingnya jejaring sosial seperti kerjasama antar-padukuhan dan pemanfaatan struktur lokal untuk meningkatkan efektivitas program, terutama dalam konteks budaya Sriharjo yang komunal (triputro, 2021). Hal sama diungkapkan oleh penelitian (Hidayati, Cikusin, dan Sekarsasi 2024) dilakukan di Desa Sompok, di desa tersebut hanya memiliki 2 pendamping PKH, namun masing-masing staff desa ikut membantu dalam pendampingan. Berikut hasil wawancara dari pendamping PKH memaparkan bahwa sebagai berikut :

“Sejauh ini dari Kalurahan belum ada, kegiatan dilakukan di rumah KPM, fasilitas yang menyediakan dari pendamping. Pedukuhan biasanya yang menyediakan tempat, seperti balai desa sompok kemarin.” (wawancara, 14 Mei 2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan peran pemerintah kalurahan dalam implementasi PKH sejauh ini belum ada. Penyediaan tempat dan sarana yang tidak memadai dalam pelaksanaan PKH. Akibatnya, kegiatan sering dilakukan di rumah-rumah KPM. Dalam kasus tertentu biasanya kegiatan dilakukan di balai Desa Sompok, karena fasilitas yang disediakan lebih efektif. Hal ini menunjukkan adanya variasi peran serta dukungan antar wilayah dalam menyukseskan implementasi PKH, dan sekaligus mengendalikan pentingnya keterlibatan struktur pemerintah desa secara merata dan sistematis. Pelatihan agar penerima manfaat tidak bergantung kepada bantuan yang diterima serta mendorong untuk mencapai tingkat kemandirian ekonomi dan secara sukarela keluar dari PKH atau graduasi mandiri.

Faktor lain sumber daya berupa finansial atau dana bagi penerima manfaat belum bisa membantu keluar dari kemiskinan, hal ini menggambarkan tujuan dari PKH belum tercapai. Tidak semua penerima manfaat PKH mendapatkan literasi keuangan, yang penting agar bantuan tidak habis hanya untuk konsumsi tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk usaha produktif. Diperlukan agar bantuan yang

diterima tidak hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari tapi juga dapat menjadi stimulus produktif. Penerima manfaat menggantungkan dana dari bantuan PKH tanpa adanya langkah yang cukup untuk meningkatkan sumber pendapatan mandiri. Agar dapat mengoptimalkan PKH perlu adanya literasi keuangan, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan, dan yang paling penting dukungan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan nominal penerima sebagai tabel berikut.

**Tabel 2** Indeks Bantuan sosial PKH Tahun 2025

No	Kategori	Indek Bantuan (Rp)/ Tahun	Indek Bantuan (Rp)/ Tiga Bulan
1	Ibu Hamil	Rp 3.000.000	Rp 750.000
2	Anak Usia Dini	Rp 3.000.000	Rp 750.000
3	Anak SD/ Sederajat	Rp 900.000	Rp 225.000
4	Anak SMP/ Sederajat	Rp 1.500.000	Rp 375.000
5	Anak SMA/ Sederajat	Rp 2000.000	Rp 500.000
6	Penyandang disabilitas	Rp 2.400.000	Rp 600.000
7	Lanjut Usia`	Rp 2.400.000	Rp 600.000
8	Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat	Rp 10.800.000	Rp 2.700.00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah dana yang diberikan beberapa kategori, bantuan anak berdasarkan tingkat pendidikan meingkat secara proposional SD (900.000) < SMP (1.500.000) < SMA (2.000.000), sesuai dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi. Dukungan untuk kelompok rentan memiliki nilai yang sama (3.000.000) bagi ibu hamil, anak usia dini menunjukkan perhatian terhadap fase awal kehidupan yang krusial serta penyandang disabilitas dan lanjut usia mendapat alokasi yang sama, salah satu responden dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa :

“Bantuan pendidikan sangat membantu sekali, karena anak-anak bisa membeli kebutuhan sekolah. Sehingga pendapatan kami bisa digunakan untuk kebutuhan pokok lainnya.” (wawancara, 23 April 2025)

Wawancara di atas memaparkan bantuan tersebut sangat membantu karena KPM tidak perlu mengalokasikan pendapatan rumah tangga untuk keperluan pendidikan, sehingga pendapatan yang terbatas dapat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok lainnya, seperti makanan dan tempat tinggal. Kondisi

ini juga menunjukkan bahwa bantuan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan terhadap akses pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen penguat ekonomi keluarga secara tidak langsung. Komponen lanjut usia (lansia) akan berbeda dengan kebutuhan keluarga manfaat dengan komponen anak sekolah. Alokasi dana yang digunakan oleh anggota lansia biasanya untuk kebutuhan dasar seperti nutrisi, dan kebutuhan pokok. Umumnya anggota lansia memiliki kebutuhan akan kesehatan yang tinggi, termasuk pemeriksaan rutin.

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas program sangat di pengaruhi oleh kesiapan dan kualitas sebagai sumber daya. Dalam konteks sumber daya manusia, keterbatasan pendidikan pada KPM menjadi tantangan utama. Sumber daya finansial berasal dari murni dari dana pusat (APBN), namun pengelola pelaksanaannya di tingkat lokal belum sepenuhnya di dukung oleh kolaborasi kelembagaan lainnya. Bantuan pendidikan yang diberikan terbukti meringankan beban keluarga dan memberi ruang bagi pendapatan rumah tangga untuk dialihkan ke kebutuhan pokok lainnya. Berikut hasil dokumentasi mengenai kegiatan pertemuan di Kalurahan Sriharjo.



Gambar 1 Aktivitas pertemuan rutin PKH  
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 2 Pendampingan PKH

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen implementator terhadap pelaksanaan suatu program. Salah satu yang menjadi kunci untuk mempengaruhi terlaksanakannya implementasi kebijakan adalah sikap dari implementator. Dalam hal ini, penerima manfaat menjadi bagian penting dari aktor kebijakan yang keberhasilan programnya sangat ditentukan oleh sikap mereka terhadap program

yang diterima. Jika kebijakan ini dilaksanakan dengan baik, pelaksana tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (Utami, 2022; dalam Makmur 2023) aspek implementasi PKH disposisi ini harus dimiliki oleh berbagai pihak seperti pendamping PKH, aparat pemerintahan, dan keluarga penerima manfaat. Disposisi ini bisa mempengaruhi bagaimana dalam menjalankan tugas, berinteraksi, dan berkomitmen terhadap tujuan dari program PKH tersebut. Disposisi menentukan apakah bantuan yang diberikan benar-benar mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, atau justru menciptakan ketergantungan. Penerima manfaat juga ada yang menganggap bantuan PKH ini sebagai hak tetap dari negara tanpa memahami sifat kondisional. program PKH menjadi kurang efektif dalam membentuk kemandirian, justru menciptakan budaya ketergantungan jangka panjang. Sehingga KPM tidak berkembang secara ekonomi meskipun menerima bantuan rutin.

Sikap pendamping PKH tidak hanya administratif, tetapi juga edukatif, komunikatif, dan transformatif. Sikap pendamping PKH menjadi penentu utama keberhasilan program, terutama dalam membangun kepercayaan, efektivitas komunikasi dan perubahan perilaku sosial. Pada umumnya pendamping PKH memiliki hubungan baik dengan KPM, namun menghadapi tantangan besar karena kesenjangan pemahaman dan jumlah KPM yang banyak dibandingkan jumlah pendamping. Berikut adalah bukti kepedulian dari pendamping PKH di Kalurahan Sriharjo dalam implementasi Program Keluarga Harapan agar tujuan dari program tersebut sesuai dengan tujuannya. Berikut hasil wawancara dari pendamping PKH :

“ Kita tiap bulannya ada monitoring, bukan tiap bulan sih mas, tapi tiap pencairan, misalnya setiap KPM harus menulis pencairan berapa. Kemudian dibelanjakan apa saja itu tetap kita minta harus di tulis di situ. Nanti nota dan struk penarikan dijadikan satu”. (wawancara, 14 Mei 2025).

Hasil dari sikap implementator dalam proses implementasi program keluarga harapan sudah sesuai dengan prosedur. Monitoring dilakukan setiap kali terjadi pencairan bantuan. KPM diwajibkan untuk mencatat jumlah dana yang dicairkan serta penggunaannya, seperti dibelanjakan untuk keperluan apa saja. KPM juga diminta untuk mengumpulkan berupa nota pembelian dan struk penarikan uang, yang selanjutnya dikumpulkan dan dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mencerminkan pendamping untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan, serta memastikan dana

tersebut benar digunakan sesuai dengan tujuan program. Kendala lain dalam menyikapi implementasi PKH ini adalah sikap dari penerima manfaat yang tidak ingin bantuannya di cabut, hal ini sebagaimana paparan dari pendamping PKH sebagai berikut :

“Saat ini yang pendamping lakukan agar KPM tidak tergantung dengan bantuan PKH, ditekankan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada. Mengarahkan ke pengembangan program yang lainnya.” (wawancara, 14 Mei 2025)

Pendataan ulang yang dilakukan pendamping PKH bertujuan untuk memastikan data sesuai dengan yang di lapangan. Fokus utama pendamping ialah memastikan bahwa KPM tidak terus-menerus bergantung pada bantuan PKH. Pendamping aktif mengarahkan KPM untuk mulai menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki, baik di tingkat keluarga maupun kelompok. Pendamping mendorong KPM agar terlibat dalam program pemberdayaan lain yang lebih produktif seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan akses ke pemodal. Adanya pelatihan tersebut diharapkan KPM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup secara berkelanjutan. Diungkapkan oleh penerima manfaat bahwa dengan graduasi mandiri akan mempengaruhi bantuan yang sudah di terimanya :

“PKH berpengaruh terhadap perekonomian kami, namun kurang mampu kalau graduasi, karena semua bantuan di cabut termasuk, bantuan kesehatan.” (wawancara, 23 April 2025)

Ketergantungan penerima manfaat mengandalkan bantuan sosial sebagai sumber pendapatan lain dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kekhawatiran terkait proses *graduasi* atau pengeluarah dari program, dikarenakan seluruh bantuan kesehatan akan ikut dicabut. Dari hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Mitra, Qadarsih, and Arieska 2023 yang menyatakan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada keluarga dengan kategori mampu, hal ini dapat diatasi dengan kesadaran diri bagi KPM untuk mengundurkan diri dari keaggotaan PKH. Sikap dan komitmen dari pendamping PKH memberikan dampak untuk terlaksanakannya implementasi PKH. Pendamping mendukung prinsip graduasi sebagai bagian dari siklus program yang sehat dan indikator keberhasilan. Pendapatan KPM dapat meningkat namun secara menyeluruh mereka belum siap menghadapi risiko sosial tanpa jaminan bantuan. Sikap pendamping PKH diharapkan untuk mengajarkan bahwa bantuan

PKH ini dapat menjadi kunci menuju batu loncatan untuk peningkatan kesejahteraan berkelanjutan.

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yang hirarkis tanpa sistem komunikasi yang efektif bisa menghambat aliran informasi. Menurut Weber organisasi sangat rasional, dan terkontrol (Boko 2022). Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja formal, organisasi di mana pekerjaan di kelompokkan, di bagi, dan di koordinasikan (Robins dan Coulter 2007:284 dalam Kasransyah 2021) . Tujuan dari organisasi ialah dapat mempengaruhi serta mendorong kepada anggotanya untuk bekerja sama dengan penuh tanggung jawab (Ghufron, 2020 dalam Khairur Rizqiyah dan Sri Nugroho 2024)

Implementasi program PKH ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang ada dengan pola yang mengatur jalannya implementasi suatu kebijakan. Keterlibatan pemerintah Kalurahan Sriharjo masih minim sehingga pengorganisasian KPM jadi terbatas. Pendamping PKH sebagai fasilitator pemerintah membangun hubungan antara penerima manfaat dengan pemerintah kalurahan dan dinas sosial. Struktur yang jelas, terdesentralisasi dengan koordinasi kuat, serta didukung dengan kapasitas SDM dan sistem pelaporan digital yang baik, akan mendorong tercapainya tujuan program secara optimal. Sebaliknya, struktur organisasi yang kaku, tumpang tindih, dan kurangnya dukungan dari pemerintah kalurahan akan menghambat fungsi pendampingan dan pemberdayaan yang menjadi inti dari PKH.

Selain struktur organisasi, keberadaan Standar operasional prosedur (SOP) juga menjadi strategis dalam sebuah implementasi program. Dalam implementasi PKH keberhasilan pelaksanaan selain tergantung pada kekuatan dan kelengkapan faktor organisasi yang terlibat juga diperlukan adanya SOP. SOP merupakan pedoman teknis dan etis agar program berjalan dengan sesuai tujuan.

Kegiatan yang wajib dilakukan oleh pendamping PKH ialah melakukan pendampingan secara berkala, memastikan penerima manfaat bisa terpenuhi atas kewajiban dalam akses kesehatan dan pendidikan. Pelaksanaan yang dilakukan pendampingan kepada keluarga manfaat oleh pendamping PKH dilakukan setiap satu bulan sekali dengan melakukan kunjungan ke setiap rumah penerima manfaat dan pertemuan kelompok. Sesuai dengan SOP proses implementasi PKH Dinas

Sosial Kabupaten Bantul memberikan pelatihan-pelatihan kepada pendamping PKH. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pendamping PKH dari Kalurahan Sriharjo, berikut :

“Kami semua mendapat dukungan langsung dari atasan dalam menjalankan tugas kami sebagai pendamping PKH di tingkat Kapanewon. Istilah BOP mungkin bisa menjadi stimulan kami selama di lapangan. Kemudian ada sertifikat dari dinas sosial bagi kami pendamping PKH” (wawancara, 14 Mei 2025)

Dari hasil wawancara dengan pendamping PKH diatas menyebutkan bahwa struktur organisasi berperan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Para pendamping merasa mendapat dukungan langsung dari atasan, yang menjadi penguat peran mereka dilapangan. Selain itu, istilah BOP (Biaya Operasional Pendamping) disebut bentuk stimulan atau motivasi tambahan yang membantu mereka dalam menjalankan tugas teknis dan sosial di Kalurahan Sriharjo. Pendamping juga diapresiasi melalui pemberian sertifikat resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, sebagai bentuk pengakuan atas peran dan kontribusi pendamping PKH. Minimnya perhatian pemerintah Kalurahan Sriharjo terhadap PKH memperlemah akar lokal dari implementasi program pemerintah pusat. Padahal peran pemerintah desa sangat penting bagi pihak yang paling dekat dengan penerima manfaat. Penelitian yang dilakukan Setianingrum et al. 2025 menemukan kurangnya transparansi mengenai kriteria penerima manfaat dan mekanisme seleksinya. Akibat dari kurangnya koordinasi dengan pemerintah Kalurahan pendamping bekerja sendiri, program terputus dari pembagunan desa, dan KPM tidak mendapat pendampingan yang utuh. Proses ini dilakukan langsung oleh pendamping PKH dengan melakukan survei langsung kepada masyarakat yang ada di Kalurahan Sriharjo. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh penerima manfaat sebagai berikut :

“Informasi mengenai penerimaan PKH ini, awal mulanya dahulu ada petugas yang datang, seperti masnya ini. Saya ditanya-tanya tentang isi rumah juga mas, didata seluruh isi rumah mas. kalau bantuan PKH ini, kalau orang bilang itu bejo-bejan, karena yang mendata langsung dari pusat, karena ada tim khususnya.”(wawancara, 23 April 2025)

Dari hasil kutipan wawancara kepada salah satu penerima manfaat di Kalurahan Sriharjo, memunculkan presepsi bahwa penerima mandaaif bersifat tergantung keberuntungan, karena merasa tidak memiliki kendali atas hasil pendapatan tersebut. Ungkapan kurangnya transparansi dan sosialisasi

mekanisme seleksi, serta menandakan adanya kesenjangan komunikasi antar pelaksana program pusat dan tingkat bawah. Dukungan Pemerintah Kalurahan Sriharjo diharapkan bekerja sama untuk memverifikasi daftar KPM berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Jika struktur organisasi ini dijalankan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada maka struktur yang jelas dari pusat ke desa (melalui dinas sosial dan pendamping PKH) akan memudahkan penyaluran informasi kebijakan. Struktur organisasi menjadi fondasi dari tata kelola PKH yang efektif. Bila struktur organisasi menjadi formalitas tanpa fungsi yang aktif, maka PKH hanya menjadi program distribusi bantuan semata, bukan alat pemberdayaan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Kesulitan yang dialami oleh pendamping PKH dalam memberikan materi atau informasi kepada keluarga penerima manfaat menjadi salah satu faktor masalah. *Kedua*, Pendamping PKH harus menerjemahkan bahasa baku dari materi ke bahasa keseharian. *Ketiga*, Keterbatasan para penerima manfaat dalam memahami bahasa yang kompleks, istilah teknis, dan konsep penerima manfaat kurang terbiasa dengan berkomunikasi secara formal dan tulisan yang panjang. *Keempat*, Sumber daya dari pemerintah Kalurahan Sriharjo yang belum ikut serta dalam proses implementasi PKH perlu menjadi perhatian pemerintah lokal. *Kelima*, Kurangnya pendamping PKH yang ada di Kalurahan Sriharjo yang mana hanya terdapat 2 pendamping saja, sehingga proses implementasi kurang maksimal. *Keenam*, Pendamping PKH sangat berkomitmen dalam implementasi program bantuan ini, yang mana setiap bulannya melakukan monitoring terhadap KPM dalam membelanjakan bantuannya.

Implementasi program PKH sebenarnya sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya program ini justru membuat para penerima manfaat menjadi ketergantungan. Mereka masih bergantung dengan bantuan dan enggan keluar dari PKH. Temuan lainnya adalah pendamping PKH sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP dan pedoman yang berlaku.

## **Saran**

Bantuan PKH diharapkan digunakan untuk keperluan sesuai dengan kebutuhannya. Agar dapat mengoptimalkan program PKH perlu adanya literasi keuangan bagi penerima bantuan, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan dan yang paling penting dukungan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Pembekalan juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman penerima manfaat untuk mendukung kemandirian mereka. Perlu dilakukannya pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi KPM sehingga dapat mengurangi ketergantungan dengan bantuan sosial. KPM diharapkan juga percaya diri untuk graduasi mandiri dari program PKH. Pendamping maupun pemerintah Kalurahan Srihajo harus lebih gencar mesosialisasikan bantuan ini sebagai batu loncatan untuk peningkatan ekonomi dan bukan sebagai bantuan konsumtif. Pihak Kalurahan harus selalu ikut hadir dalam proses implementasi PKH, dan dapat memfasilitasi KPM berupa pemberdayaan ekonomi agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi.

Pemerintah Kalurahan perlu membuat kebijakan teknis untuk mengoptimalkan implementasi program PKH ini. Seperti pembentukan tim untuk pemantau program PKH serta tim pemberdayaan ekonomi bagi alumni penerima manfaat PKH.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, diantaranya masih terbatasnya informasi dan data jumlah penerima manfaat yang enggan graduasi dari program PKH serta apa saja penyebabnya. Oleh karena itu disarankan bagi peneliti berikutnya untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait factor-faktor yang mempengaruhi penerima manfaat enggan graduasi dari program PKH. Selain itu peneliti berikutnya juga dapat mengkaitkan antara program PKH dengan program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) sebagai bentuk keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. 2023. *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jambi. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>.

- Badan Pusat Statistik. 2024. "Dalam Angka 2023 Kecamatan Imogiri Dalam Angka BPS-Statistics Bantul Regency." 36.
- Baiq Dewi Kamariani, Nur Fitri Eka Asbarini, Asrifia Ridwan, and Abdul Chalel Rahman. 2024. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Journal Of Administrative And Social Science* 5(1):205–19. doi:10.55606/jass.v5i1.929.
- Boko, Yusri A. 2022. "Perkembangan Teori Manajemen (Teori Ilmah Dan Teori Organisasi Klasik)." 49–61. doi:10.5281/zenodo.6972610.
- Dehani, Maya, Denny Hernawan, and Irma Purnamasari. 2018. "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor."
- Gilbert Ardian Sasue. 2023. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)." Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD," Yogyakarta.
- Hidayat, Syarif, Adji Suradji Muhammad, Sekolah Tinggi Pembangunan, Masyarakat Desa, " Apmd, and " Yogyakarta. 2024. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bantul*. Vol. 5. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>.
- Hidayati, Maulidia, Yaqub Cikusin, and Retno Wulan Sekarsasi. 2024. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Togumbang Dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan*. Vol. 18. <https://pkh.kemosos.go>.
- Idrus, Muhammad, Sofyan Afandi, Manijo, Adi Rachmad Kartolo, and Ady Wahyudi. 2023. "LINGKUNGAN KPU (Studi Pada KPU Provinsi Sumatera Selatan)." 6:121–34.
- Kasransyah, Faizal R. 2021. "Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Struktur Organisasi terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar." *Ejournal.Stiepancasetia.Ac.Id*.
- Khairur Rizqiyah, Ayu, and Hanantyo Sri Nugroho. 2024. *Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul*. Vol. 6.
- Komalasari, Dewi, and Fentiny Nugroho. 2023. "Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi Pada Pendamping Sosial Dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial Dan Nonkesejahteraan Sosial)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17(5):3182. doi:10.35931/aaq.v17i5.2632.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by Fitriatun Annisya. SE and S. IP. , S. Sukarno. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

- Makmur, Syarif. 2023. "Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan." 1:172–76.
- Menteri Sosial Republik Indonesia. 2023. "PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA." (Permensos RI No.7 tahun 2023).
- Mitra, Nori A., Mariza A. Qadarsih, and Arieska. 2023. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Siulak Kecil Mudik Kec. Siulak Kab. Kerinci)." 5:1145–52.
- Nilamsari, Natalina. 2014. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.
- Pratiwi, Retno, Novia Kencana, and Harsi Romli. 2022. "Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ilir)." *Universitas Indo Global Mandiri Palembang JL. Jend. Sudirman 7(1):47–55*.
- Rahayu, Ratih, Faizal Anwar, and Titi Darmi. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa." *JMPKP 5*.
- Rini, Ayu Setyo, and Lilik Sugiharti. 2017a. "Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 1(2)*. doi:10.20473/jiet.v1i2.3252.
- Rini, Ayu Setyo, and Lilik Sugiharti. 2017b. "Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan 1(2)*. doi:10.20473/jiet.v1i2.3252.
- Al Rosyd, Harun, and Oktiva Anggraini. 2023. "Implementasi Pengelolaan Dana Bergulir Di Pasar Rakyat Imogiri Kabupaten Bantul." *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik 5:31–49*.
- Sasue, Gilbert Ardian, and Marliyantoro AY Oelin. 2023. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kalurahan Trimulyo Dan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta.
- Setianingrum, Eka Sugiarti, David Laiyan, Syahrabudin Husein Enala, and Frederikus Mana Mana. 2025. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera Di Kampung Sumber Rejeki Distrik Kurik Kabupaten Merauke*. Vol. 02.
- Soelistyarini, Titien Diah. 2013. *Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*. Surabaya.
- Suleman, Syahputra Adisanjaya, and Risna Resnawaty. 2017. "Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Pengentasan Kemiskinan." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4:8892*.
- Zakiah, Nuruz, and Diana Hertati. 2024. "Implementation of Birth Certificate Preparation for a Mother's Child through Klampid New Generation (KNG) in Rungkut Menanggal Village Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak

Seorang Ibu Di Kantor Kelurahan Rungkut Menanggal Melalui Klampid New Generation (KNG)." *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan* 6.